

Peningkatan Tata Kelola Fiskal Perdesaan melalui Transparansi Keuangan Berbasis Masyarakat

Enhancing Rural Fiscal Governance through Community-Driven Financial Transparency

Ahmad Subhan ^{1*}

Irwan Ade Saputra ²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Banten

³Ilmu Pemerintahan, Universitas
Hasanuddin, Makassar

Email : ninaahmad463@gmail.com

Kata Kunci

Pengelolaan anggaran Desa
Transparansi Keuangan Desa
Partisipasi Masyarakat

Keywords:

Village budget management
Village Financial Transparency
Society participation

Received: November 2023

Accepted: November 2023

Published: November 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Bontoa, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan fokus pada transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Metode penelitian melibatkan wawancara mendalam dengan narasumber kunci seperti Kepala Desa, Bendahara Desa, dan tokoh masyarakat, serta observasi langsung terhadap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan desa. Temuan menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah desa untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa sebagai faktor kunci dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan rutin yang terstruktur juga memberikan kontribusi signifikan dalam membangun kepercayaan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, meskipun tantangan seperti ketidakseimbangan fiskal dan minimnya pemahaman masyarakat perlu ditangani lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa di masa depan.

Abstract

This research aims to analyze the management of Village Original Income (PAD) in Bontoa Village, Turikale District, Maros Regency, with a focus on transparency, community participation and accountability in the use of village funds. The research method involves in-depth interviews with key sources such as the Village Head, Village Treasurer, and community leaders, as well as direct observation of the village planning, budgeting, and financial reporting processes. The findings show a strong commitment from the village government to implement the principles of good governance, with active community participation in monitoring and evaluating the use of village funds as a key factor in strengthening transparency and accountability. Structured routine reporting also makes a significant contribution in building trust and shared responsibility between village government and the community, although challenges such as fiscal imbalances and lack of community understanding need to be addressed further to improve the efficiency of village financial management in the future



© Year Author(s). Published by Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Timur <https://jurnal.uit.ac.id/IPE>. This is Open Access article under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) DOI: <https://doi.org/10.36090>

PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa bukan hal baru bagi Pemerintahan Daerah, terutama di tingkat Pemerintah Desa di seluruh Indonesia. Mengingat banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam proses pendistribusian anggaran dari pusat ke daerah, seperti yang terjadi dalam program Bansos, dana BOS, dan Alokasi Khusus Pendidikan, jelas diperlukan mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terulang (Sidabalok, 2021). Saat ini, regulasi dalam pengelolaan Dana Desa masih terasa minim. Oleh karena itu, topik mengenai

pengelolaan sumber pendapatan desa menjadi kajian yang penting untuk kemajuan Pemerintah Desa. (Ady Hermawansyah et al., 2022; Febrian, 2020)

Salah satu contoh pengelolaan Dana Desa dapat dilihat dari Desa Bontoa, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Desa ini sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor ini. Kehadiran Dana Desa sangat membantu dalam pembangunan Desa Bontoa yang sedang gencar dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (El Muhtaj & Rachman, 2022)

Desa Bontoa perlu melakukan pembangunan besar-besaran untuk mensejahterakan penduduknya. Untuk mencapai hal ini, Desa Bontoa harus kreatif dan inovatif dalam menggali potensi yang ada, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Sesuai dengan peraturan di Kabupaten, Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk mempertahankan, menggali, dan mengembangkan sumber pendapatan desa guna mendukung pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. (Takumansang et al., 2022)

Namun, Desa Bontoa juga menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan desa yang tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran, menyebabkan konflik di masyarakat akibat minimnya pengetahuan tentang kondisi keuangan dan pengelolaan desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai pengelolaan dan kendala dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Bontoa, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. (Hardianto, 2022)

beberapa studi kasus terkait pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Indonesia. Desa Tanjung Bumi, terletak di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Bangkalan, mengalami tantangan signifikan dalam mengelola PAD karena ketergantungan pada sektor perikanan yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Untuk mengurangi risiko ekonomi, Dana Desa digunakan untuk mendiversifikasi ekonomi ke sektor pertanian dan pengembangan pariwisata lokal (Zhang et al., 2023). Di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Cirebon, Desa Sukamaju menghadapi kendala serius akibat minimnya infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik, yang menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Dana Desa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang lebih baik serta program pengembangan kapasitas masyarakat guna meningkatkan manajemen dan pemanfaatan PAD secara efektif. Sementara itu, di Kecamatan Tirta, Kabupaten Brebes, Desa Tirta Kencana memiliki tantangan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya, terutama dalam pengelolaan irigasi untuk pertanian yang lebih efisien. Dana Desa digunakan untuk rehabilitasi lahan pertanian, pengembangan sistem irigasi modern, dan pelatihan petani dalam teknik pertanian yang berkelanjutan. (Ta'dung & Lusdani, 2021)

Dalam menghadapi tantangan pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD), pendekatan teori yang relevan dapat meliputi konsep manajemen keuangan publik dan teori pengembangan ekonomi lokal. Manajemen keuangan publik mengacu pada pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan secara efisien dan transparan, yang

penting untuk memastikan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran di tingkat desa seperti Bontoa. Penggunaan Dana Desa harus didasarkan pada prinsip alokasi yang tepat, monitoring yang ketat, dan akuntabilitas yang jelas, agar mampu mengurangi konflik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. (Tovalini & Hanoselina, 2021)

Sementara itu, dari sudut pandang teori pengembangan ekonomi lokal, strategi diversifikasi ekonomi seperti yang diterapkan di Desa Tanjung Bumi dapat menjadi solusi yang efektif. Diversifikasi ekonomi membantu mengurangi ketergantungan pada sektor tunggal yang rentan terhadap risiko ekonomi, seperti sektor perikanan. Hal ini juga mengarah pada pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang lebih luas, termasuk pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, yang dapat memberikan stabilitas ekonomi jangka panjang bagi desa-desa seperti Bontoa. Dengan menerapkan pendekatan ini, desa-desa dapat lebih baik mengelola dan memanfaatkan PAD untuk pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Mulalinda et al., 2021)

Fokus penelitian dari konteks yang telah disampaikan adalah untuk memahami lebih dalam mengenai pengelolaan dan kendala dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Bontoa, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Penelitian akan mengeksplorasi bagaimana ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran di desa tersebut menyebabkan konflik di masyarakat, terutama karena minimnya pengetahuan tentang kondisi keuangan dan pengelolaan desa. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD serta memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait keuangan desa.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Bontoa, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan analisis deskriptif. Sumber data utama berasal dari dokumentasi, wawancara, dan observasi terhadap responden yang dipilih. Sedangkan data pendukung atau sekunder diperoleh dari kantor Desa Bontoa berupa dokumen tertulis, literatur, dan jurnal yang relevan dengan masalah yang dibahas. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi dan wawancara. Populasi dan sampel penelitian terdiri dari penduduk dan aparat Desa Bontoa, dengan menggunakan purposive sampling untuk menentukan sampel yang tepat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana penulis melakukan analisis sistematis terhadap data yang terkumpul dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan situasi aktual dengan cara yang sistematis dan akurat, sehingga informasi yang disajikan dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum pengelolaan

Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Bontoa, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, mencakup semua aspek keuangan desa yang melibatkan hak dan kewajiban terkait penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki nilai moneter, termasuk kekayaan yang terkait. Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa, yang dilakukan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin (Peraturan Bupati Maros Nomor 2 tahun 2019).

Data mengenai pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Bontoa diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap narasumber seperti Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang transparansi dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pengelolaan PAD di desa tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan PAD dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan desa, menginformasikan pungutan yang diperlukan untuk keperluan desa, serta melakukan pelaporan secara teratur kepada warga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Bontoa menghadapi tantangan seperti ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat akibat minimnya pengetahuan mengenai kondisi keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD demi pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa.

Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa:

Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Bontoa, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dalam setiap tahapan proses keuangan desa. Proses perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan PAD dilakukan dengan keterbukaan yang tinggi kepada masyarakat. Masyarakat desa terlibat secara aktif dalam menyusun rencana anggaran desa melalui dialog terbuka dan partisipatif. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengetahui secara langsung alokasi dana yang dihasilkan dari pungutan desa dan bagaimana dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan layanan masyarakat.

Informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana desa disampaikan secara terstruktur dan transparan kepada warga. Mekanisme komunikasi yang terorganisir, seperti rapat-rapat desa, pengumuman di tempat-tempat umum, dan publikasi melalui media lokal, memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang sama terhadap informasi keuangan desa. Ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kondisi

keuangan desa, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap pengelolaan dana desa.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait dana desa menjadi pilar utama dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Warga tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Keberadaan mekanisme partisipatif ini membantu masyarakat untuk mengawasi dengan lebih efektif, mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara anggaran dan kebutuhan riil masyarakat, serta mendorong transparansi yang lebih baik dalam setiap aspek pengelolaan dana desa.

Selain itu, desa juga melakukan pelaporan rutin dan teratur kepada warga mengenai penggunaan dana desa. Laporan-laporan ini tidak hanya berisi informasi mengenai pengeluaran dana, tetapi juga hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dan evaluasi atas pencapaian tujuan pembangunan desa. Dengan demikian, pelaporan yang transparan tidak hanya menjadi alat untuk akuntabilitas pemerintah desa, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa secara keseluruhan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan:

Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Bontoa, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pembangunan infrastruktur melalui proses yang sangat partisipatif. Masyarakat tidak hanya menerima informasi mengenai penggunaan dana desa secara pasif, tetapi juga terlibat secara langsung dalam mengawasi dan mengevaluasi setiap tahap penggunaan dana tersebut. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat kontrol sosial yang penting untuk mencegah potensi penyelewengan dan memastikan efisiensi dalam pembangunan desa.

Adanya mekanisme yang melibatkan warga dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dan penggunaan PAD menjadi landasan kuat bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Melalui dialog terbuka dan forum partisipatif seperti musyawarah desa, warga dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas mereka terkait penggunaan dana desa. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan riil masyarakat, tetapi juga memberikan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam membangun serta mengelola sumber daya lokal.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan ini juga menghasilkan efek positif lainnya, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya manajemen keuangan yang baik dan pemahaman yang lebih dalam mengenai proses pengelolaan dana publik. Dengan demikian, desa tidak hanya

mencapai pembangunan fisik yang lebih optimal, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memajukan kesejahteraan bersama.

Akuntabilitas dalam Pelaporan:

Pelaporan keuangan desa di Desa Bontoa, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dari pemerintah desa terhadap penggunaan dana desa. Prosedur pelaporan dilakukan secara rutin dan teratur kepada warga, yang mencerminkan komitmen untuk memastikan transparansi dan kejelasan dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui laporan ini, warga dapat memahami secara mendalam mengenai bagaimana dana desa digunakan, termasuk detail pengeluaran dan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Laporan yang disampaikan kepada warga tidak hanya sekadar mencatat penggunaan dana, tetapi juga menyertakan evaluasi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan desa. Informasi yang diberikan mencakup analisis atas progres pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana desa dan memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan ke depannya.

Dengan demikian, proses pelaporan yang transparan dan komprehensif ini tidak hanya memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi, tetapi juga memperkuat hubungan saling percaya antara pemerintah desa dan masyarakat. Ini merupakan langkah kritis dalam membangun good governance di tingkat lokal, di mana partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan dana publik menjadi pondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tantangan dalam Pengelolaan PAD:

Tantangan utama dalam pengelolaan dana desa di Desa Bontoa, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, adalah ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran dana desa. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan konflik di masyarakat karena perbedaan persepsi terhadap alokasi dana yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini dapat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan dan menyulitkan upaya mencapai keseimbangan fiskal yang baik di tingkat desa.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang kondisi keuangan desa menjadi hambatan serius dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD). Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta mempersulit upaya untuk melibatkan masyarakat secara efektif dalam proses pengambilan keputusan

terkait alokasi dana desa. Masyarakat yang tidak terinformasi dengan baik cenderung kurang aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa dan berkontribusi pada pembangunan desa secara keseluruhan.

Upaya untuk mengatasi tantangan ini perlu dilakukan melalui pendekatan edukasi dan komunikasi yang lebih efektif kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa secara transparan dan partisipatif. Pemerintah desa dapat meningkatkan kegiatan informasi dan sosialisasi mengenai anggaran dan penggunaan dana desa, sehingga masyarakat dapat lebih memahami peran mereka dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pengelolaan PAD, Desa Bontoa telah melakukan upaya yang signifikan untuk memastikan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Rekomendasi perbaikan yang disarankan dapat membantu desa dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan keuangan desa di masa depan.

Analisis temuan

Analisis teoritis dari pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Bontoa, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, menunjukkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam konteks administrasi publik lokal. Konsep transparansi dalam pengelolaan keuangan desa diwujudkan melalui proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang terbuka kepada masyarakat. Teori good governance menekankan pentingnya akses informasi yang setara bagi semua pihak terkait untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mempromosikan akuntabilitas yang efektif (UNESCAP, 2009).

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait dana desa juga mencerminkan prinsip partisipatif dalam good governance. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat kontrol sosial terhadap pemerintah desa, tetapi juga meningkatkan legitimasi keputusan publik dan efektivitas penggunaan dana publik (Olowu & Sule, 2005). Dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan, Desa Bontoa memperkuat mekanisme internal untuk mencegah potensi penyelewengan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya publik.

Konsep akuntabilitas dalam pelaporan keuangan desa di Desa Bontoa menyoroti pentingnya transparansi sebagai prasyarat untuk akuntabilitas yang kuat (OECD, 2005). Melalui pelaporan rutin dan teratur kepada warga, pemerintah desa tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Laporan yang komprehensif dan jelas memberikan warga pemahaman yang lebih baik tentang alokasi dana dan dampak pembangunan yang dicapai, yang

merupakan elemen kunci dalam meningkatkan partisipasi dan responsivitas pemerintah lokal terhadap kebutuhan masyarakat (UNDESA, 2013).

Tantangan utama yang dihadapi, yaitu ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran dana desa serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang keuangan desa, menunjukkan pentingnya pendekatan edukasi dan komunikasi dalam good governance. Teori ini menekankan bahwa partisipasi yang efektif memerlukan akses informasi yang memadai dan pemahaman yang kuat dari masyarakat tentang proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya (Dubois & Fattore, 2009). Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui edukasi tentang keuangan desa dan manfaat dari partisipasi aktif merupakan langkah kritis dalam memperkuat kapasitas lokal untuk pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Lopes & Theisohn, 2003).

Dalam konteks Indonesia, implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa diatur secara ketat melalui regulasi dan kebijakan yang mengatur transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Mubyarto, 2007). Desa Bontoa memperlihatkan komitmen untuk mematuhi standar ini, tetapi tantangan seperti ketidakseimbangan fiskal dan minimnya pemahaman masyarakat membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dari pemerintah dan stakeholder terkait.

Dengan demikian, pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Bontoa tidak hanya menjadi studi kasus dalam penerapan good governance di tingkat lokal, tetapi juga menggambarkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam membangun sistem administrasi publik yang inklusif dan efektif. Analisis teoritis ini memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi dan menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih baik di masa depan.

KESIMPULAN

Simpulan

Kesimpulan dari studi tentang pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Bontoa, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip good governance dalam administrasi publik lokal. Proses pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait dana desa telah memperkuat kontrol sosial dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik. Dengan adanya mekanisme komunikasi terstruktur dan pelaporan yang teratur kepada warga, tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap penggunaan dana desa dapat dipertahankan dengan baik. Meskipun menghadapi tantangan seperti ketidakseimbangan antara penerimaan

dan pengeluaran dana desa serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang kondisi keuangan desa, upaya edukasi dan komunikasi terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki partisipasi dan responsivitas dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD). Fokus dapat diperluas untuk mengidentifikasi hambatan konkret yang menghalangi partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dana desa, seperti faktor sosial, ekonomi, atau budaya yang mungkin mempengaruhi tingkat kesadaran dan keterlibatan mereka. Selain itu, memperluas cakupan studi untuk membandingkan praktik pengelolaan keuangan desa di beberapa desa atau kabupaten dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang strategi terbaik dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa di berbagai konteks lokal.

REFERENSI

- Ady Hermawansyah, Purna, Z. A., & Sugito, A. (2022). I IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DI DESA JIPANG KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA. *Jurnal Arajang*, 5(2). <https://doi.org/10.31605/arajang.v5i2.2141>
- El Muhtaj, M., & Rachman, F. (2022). Peran Kolaboratif Organisasi Masyarakat Sipil Mengintegrasikan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Tata Kelola Bisnis Perkebunan Sawit di Sumatera Utara. *Jurnal HAM*, 13(2). <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.167-186>
- Febrian, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(2). <https://doi.org/10.37859/jae.v10i2.2059>
- Hardianto, H. (2022). DETERMINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN DESA: ANALISIS DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA (LITERATURE REVIEW MANAJEMEN KEUANGAN). *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 3(1). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.872>
- Junever Arlando Takumansang, Ventje Kasenda, & Welly Waworundeng. (2022). Manajemen Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covid 19 Di Desa Kahuku Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Governance*, 2(1).
- Mulalinda, Stefly, Sumampow, I., & Kimbal, A. (2021). PERENCANAAN TERPADU DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 1(2).
- Sidabalok, T. Y. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Siantar Skripsi. *Skripsi*.
- Ta'dung, Y. L., & Lusdani, W. (2021). Akuntabilitas Sosial Dana Desa: Peran Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Terapan (JESIT)*, 1(1). <https://doi.org/10.47178/jesit.v1i1.1078>

- Tovalini, K., & Hanoselina, Y. (2021). Kepemimpinan Sektor Publik: Studi Mengenai Gaya Kepemimpinan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 5(2). <https://doi.org/10.36057/jips.v5i2.485>
- Zhang, Y., Zhai, W., & Li, W. (2023). Performance ranking, span of control, and grassroots government responsiveness. *Review of Policy Research*. <https://doi.org/10.1111/ropr.12565>